

Sosialisasi Penyusunan *Policy Brief* Berbasis *Evidence-Based Policy* Bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Edwar Juliartha¹, Suandi², Abdul Rauf³, Vera Finidia Indah⁴

^{1),2)} Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sjakhyakirti, Palembang

³⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Sjakhyakirti, Palembang

⁴⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN, Palembang

Email: edwar_juliartha@unisti.ac.id¹, suandi@unisti.ac.id², abdul_rauf@unisti.ac.id³, verafinidiaindah@gmail.com⁴

Abstract

The Policy Analyst Functional Position plays a strategic role in supporting the public policy formulation process by developing recommendations based on data and scientific evidence. However, there are still limitations in the understanding and implementation of Evidence-Based Policy and the preparation of policy briefs, which are among the primary outputs of Policy Analysts. Therefore, this community service program aimed to enhance the knowledge and competencies of Policy Analysts in preparing evidence-based policy briefs. The activity was conducted in the form of a socialization program on July 6, 2026, at the Regional Human Resource Development Agency (BPSDMD) of South Sumatra Province, involving 45 participants from various regional government agencies within the Provincial Government of South Sumatra. The implementation methods included lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, and the presentation of policy brief examples. One of the resource persons was a lecturer from Universitas Sjakhyakirti. The results indicated that participants actively engaged in the program and demonstrated strong enthusiasm throughout the discussions. The activity improved participants' understanding of the Evidence-Based Policy concept, the importance of utilizing data and empirical evidence in policy analysis, and the systematic preparation of effective policy briefs as a medium for communicating policy recommendations to decision-makers. This community service activity contributed positively to strengthening the competencies of Policy Analysts and is expected to encourage the wider implementation of evidence-based policymaking within regional government institutions.

Keywords: *Evidence-Based Policy, Policy Brief, Policy Analyst, Community Service.*

Abstrak

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik melalui penyusunan rekomendasi yang berbasis data dan bukti ilmiah. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman dalam penerapan *Evidence-Based Policy* dan penyusunan *policy brief* sebagai salah satu produk utama Analis Kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

mengenai penyusunan *policy brief* berbasis *Evidence-Based Policy*. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pada tanggal 6 Juli 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan 45 peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta pembahasan contoh *policy brief*. Salah satu narasumber pada kegiatan ini merupakan dosen dari Universitas Sjakhyakirti. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti sosialisasi dengan antusias dan aktif dalam proses diskusi. Peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsep *Evidence-Based Policy*, pentingnya pemanfaatan data dan bukti empiris dalam analisis kebijakan, serta sistematisa penyusunan *policy brief* yang efektif sebagai media penyampaian rekomendasi kepada pengambil keputusan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan diharapkan mampu mendorong penerapan penyusunan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Evidence-Based Policy, Policy Brief, Analis Kebijakan, Pengabdian Kepada Masyarakat*

Pendahuluan

Perubahan lingkungan strategis pemerintahan yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan publik, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif menuntut proses perumusan kebijakan publik yang semakin adaptif dan berbasis bukti. Dalam era reformasi birokrasi, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan tidak lagi hanya didasarkan pada pengalaman maupun pertimbangan administratif semata, tetapi harus didukung oleh data yang valid, hasil penelitian, evaluasi program, serta berbagai informasi empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut dikenal sebagai *Evidence-Based Policy*, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar utama dalam proses penyusunan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, objektif, dan tepat sasaran (OECD, 2022; World Bank, 2023).

Dalam mendukung proses tersebut, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki peran strategis sebagai penyedia analisis dan rekomendasi kebijakan

bagi pimpinan instansi pemerintah. Seorang Analis Kebijakan dituntut memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan publik, mengumpulkan dan menganalisis data, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kompetensi tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi Analis Kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun sosialisasi yang mendukung peningkatan kapasitas profesional aparatur (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2023).

Salah satu produk utama yang dihasilkan oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah *policy brief*, yaitu dokumen singkat yang berisi identifikasi isu strategis, analisis permasalahan, alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang disusun secara sistematis untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang paling tepat. Penyusunan *policy brief* memerlukan kemampuan analisis yang baik serta pemanfaatan bukti empiris yang relevan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Menurut Dunn (2018), kualitas suatu rekomendasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan analis dalam mengintegrasikan berbagai sumber informasi menjadi alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Sementara itu, Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa penggunaan bukti dalam analisis kebijakan akan meningkatkan efektivitas kebijakan publik karena keputusan yang diambil didasarkan pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, di antaranya masih terbatasnya pemahaman mengenai konsep *Evidence-Based Policy*, belum optimalnya kemampuan menyusun *policy brief* sesuai kaidah ilmiah, serta masih rendahnya pemanfaatan data dan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan

rekomendasi kebijakan. Selain itu, sebagian Analis Kebijakan masih mengalami kesulitan dalam menyusun rekomendasi yang ringkas, sistematis, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui kegiatan pengembangan kapasitas masih sangat diperlukan agar Analis Kebijakan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur, termasuk bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Penyusunan *Policy Brief* Berbasis *Evidence-Based Policy* yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi di bidang analisis kebijakan dan pengembangan kompetensi aparatur, salah satunya merupakan dosen dari Universitas Sjakhyakirti. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep *Evidence-Based Policy*, struktur dan sistematika penyusunan *policy brief*, serta pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas, objektif, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pada hari Senin, 6 Juli 2026, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif (*participatory learning*) melalui penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta pembahasan contoh penerapan *policy brief*. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran, mendorong pertukaran pengalaman, serta memperkuat pemahaman konseptual melalui interaksi antara narasumber dan peserta (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2023). Selain itu, sosialisasi merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep, kebijakan, dan praktik kerja yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional (Kementerian PANRB, 2023).

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini berfokus pada Penyusunan *Policy Brief* Berbasis *Evidence-Based Policy* sebagai salah satu kompetensi utama Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai konsep *Evidence-Based Policy* dan pentingnya penggunaan bukti (*evidence*) dalam proses penyusunan kebijakan publik. Narasumber menjelaskan bahwa rekomendasi kebijakan yang berkualitas harus didasarkan pada data yang valid, hasil penelitian, evaluasi program, maupun informasi empiris lainnya sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *evidence-informed policy making* yang menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan (OECD, 2022; World Health Organization, 2024).

Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada struktur *policy brief* yang meliputi identifikasi isu strategis, latar belakang permasalahan, analisis situasi, penyajian bukti pendukung, penyusunan alternatif kebijakan, analisis kelebihan dan kelemahan setiap alternatif, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Narasumber juga menjelaskan prinsip penyusunan *policy*

brief, yaitu ringkas, objektif, sistematis, mudah dipahami, berorientasi pada penyelesaian masalah, serta didukung oleh bukti yang relevan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan (Dunn, 2018; Howlett, Ramesh, & Perl, 2020).

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai berbagai permasalahan kebijakan yang dihadapi pada instansi masing-masing serta pembahasan contoh *policy brief* yang telah digunakan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Peserta diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya, kemudian mendiskusikan alternatif penyelesaiannya berdasarkan prinsip *Evidence-Based Policy*. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai teknik penyusunan rekomendasi kebijakan yang sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai *Evidence-Based Policy*, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam penyusunan *policy brief* sebagai salah satu instrumen penting yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Penyusunan *Policy Brief* Berbasis *Evidence-Based Policy* dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juli 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kerja sama antara Universitas Sjakhyakirti dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Perubahan lingkungan strategis pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis bukti. Dalam kondisi tersebut, Analisis Kebijakan memiliki peran yang semakin penting sebagai penyedia analisis dan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi Analisis Kebijakan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung sesuai dengan agenda yang telah dirancang oleh panitia. Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan, sambutan dari pihak BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan serta foto bersama. Salah satu narasumber berasal dari Universitas Sjakhyakirti yang menyampaikan materi mengenai penyusunan *Policy Brief* berbasis *Evidence-Based Policy*. Kehadiran akademisi dalam kegiatan ini memberikan perspektif ilmiah mengenai pentingnya penggunaan hasil penelitian dan bukti empiris dalam proses penyusunan kebijakan publik.



Pada sesi penyampaian materi, narasumber menjelaskan bahwa *Evidence-Based Policy* merupakan pendekatan yang menempatkan data, hasil penelitian,

evaluasi program, dan berbagai informasi empiris sebagai dasar utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif karena setiap rekomendasi yang disusun memiliki dasar ilmiah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar *Evidence-Based Policy*, jenis-jenis bukti yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan, teknik mengidentifikasi isu strategis, serta langkah-langkah penyusunan *policy brief*.

Narasumber juga menjelaskan bahwa *policy brief* merupakan salah satu media komunikasi kebijakan yang dirancang secara ringkas namun mampu menyampaikan informasi penting kepada pengambil keputusan. Oleh karena itu, penyusunan *policy brief* harus memperhatikan aspek kejelasan permasalahan, kualitas analisis, kelengkapan bukti pendukung, alternatif kebijakan yang tersedia, serta rekomendasi yang realistis untuk diterapkan. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kualitas suatu *policy brief* tidak hanya ditentukan oleh format penulisannya, tetapi juga oleh kualitas data dan analisis yang mendukung isi dokumen tersebut.

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap berbagai contoh penerapan *Evidence-Based Policy* pada kebijakan pemerintah. Beberapa peserta menyampaikan pengalaman bahwa rekomendasi kebijakan yang disusun di instansi masing-masing masih lebih banyak didasarkan pada kebutuhan administratif dibandingkan hasil penelitian maupun evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbasis bukti masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pejabat fungsional yang bertugas melakukan analisis kebijakan.



Gambar 2. Penyampaian Materi dan Diskusi Interaktif

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Sesi diskusi menjadi bagian yang paling aktif selama kegiatan berlangsung. Peserta berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah sehingga isu yang dibahas sangat beragam, mulai dari pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Melalui diskusi tersebut peserta tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan dari narasumber, tetapi juga saling berbagi pengalaman mengenai praktik penyusunan rekomendasi kebijakan yang selama ini dilakukan di instansi masing-masing.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami pentingnya data dalam proses penyusunan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses terhadap data yang terintegrasi, kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar analisis, serta masih terbatasnya pengalaman dalam menyusun *policy brief* sesuai dengan standar yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi Analis Kebijakan tidak hanya memerlukan penguasaan teori, tetapi juga latihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Pembahasan selama kegiatan juga menekankan bahwa penggunaan data harus diikuti dengan kemampuan melakukan analisis yang sistematis. Data yang tersedia perlu diolah menjadi informasi yang mampu menjelaskan akar permasalahan, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai

alternatif penyelesaian yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat normatif, tetapi benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Iswanto, Miskan, dan Holifah (2025) yang menyatakan bahwa penguatan sistem Satu Data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi *Evidence-Based Policy*. Integrasi data yang baik akan meningkatkan kualitas analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian Septiandika et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan sosialisasi penyusunan *policy brief* mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun rekomendasi kebijakan secara sistematis dan berbasis bukti.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan komunikatif. Narasumber tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga memberikan berbagai contoh kasus yang berasal dari praktik penyusunan kebijakan di lingkungan pemerintahan. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami materi karena dapat langsung mengaitkan konsep yang dipelajari dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Interaksi dua arah antara narasumber dan peserta juga mendorong terciptanya proses pembelajaran yang lebih aktif dibandingkan metode ceramah satu arah.



Gambar 3. Foto Bersama Narasumber dan Peserta

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta selama mengikuti sosialisasi. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi, hingga penutupan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Partisipasi aktif peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan, karena menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep *Evidence-Based Policy*, struktur *policy brief*, serta pentingnya penggunaan data dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan. Peserta mulai memahami bahwa rekomendasi kebijakan yang berkualitas harus didukung oleh bukti empiris, analisis yang sistematis, serta mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan sebelum menentukan rekomendasi akhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kapasitas konseptual peserta sekaligus memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mengenai penyusunan *Policy Brief* berbasis *Evidence-Based Policy*. Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara Universitas Sjakhyakirti dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan lanjutan atau pendampingan penyusunan *policy brief* sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghasilkan dokumen *policy brief* yang siap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan *Policy Brief* Berbasis *Evidence-Based Policy* yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Juli 2026 berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari 45 peserta Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Pelaksanaan sosialisasi yang dikemas melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep *Evidence-Based Policy*, pentingnya pemanfaatan data dan bukti ilmiah dalam proses analisis kebijakan, serta sistematika penyusunan *policy brief* sebagai media penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan mengenai tahapan penyusunan *policy brief* yang sistematis, mulai dari identifikasi isu strategis, analisis permasalahan, penyusunan alternatif kebijakan, hingga perumusan rekomendasi yang didukung oleh bukti empiris. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga memberikan gambaran praktis mengenai penerapan *Evidence-Based Policy* dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, sosialisasi ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih aplikatif, seperti praktik penyusunan *policy brief* berdasarkan studi kasus nyata di lingkungan perangkat daerah, sehingga kompetensi Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, berbasis bukti, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dapat terus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Badan Kepegawaian Negara. (2023). *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Endiartia, J. (2025). *Strengthening policy advisory systems: Reformasi Badan Keahlian DPR untuk evidence-based legislation*. *Suara Analis Kebijakan*, 3(3). <https://sajak.lan.go.id/article/view/60>
- Head, B. W. (2022). *Evidence, uncertainty, and public policy*. *Public Policy and Administration*, 37(4), 421–438.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Iswanto, D., Miskan, & Holifah, N. (2025). *Optimalisasi satu data untuk kebijakan berbasis bukti di Jawa Timur*. *Suara Analis Kebijakan*, 3(3). <https://sajak.lan.go.id/article/view/67>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional*. Kementerian PANRB.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). *Jurnal Analis Kebijakan*, 6(2). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Building trust to reinforce democracy: Main findings from the 2021 OECD survey on drivers of trust in public institutions*. OECD Publishing.
- Panjaitan, P., & Saputra, N. A. (2025). *Akselerasi review policy brief dengan menggunakan kecerdasan buatan*. *Jurnal Analis Kebijakan*, 9(2), 73–79. <https://doi.org/10.37145/wnfzp742>
- Septiandika, R., Sucahyo, Rahmadi, & Fitria. (2022). *Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan penyusunan policy brief berbasis bukti*. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 115–124.
- United Nations Development Programme. (2022). *Strengthening public institutions for the Sustainable Development Goals*. UNDP.

World Bank. (2023). *World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies*. World Bank.

World Health Organization. (2024). *Evidence, policy and impact: WHO strategy for evidence-informed decision-making*. World Health Organization.